

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANTARAN REL KERETA API SENEN JAKARTA

(Studi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakarta)

Oleh: Nouke A. Komansilan

Nouke A. Komansilan. 2012. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakarta. (Studi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakarta).

Poverty is a social phenomenon that is found in many societies within countries. It is considered influenced by many factors. The aim of this study is to know the impact of poverty reduction policies undertaken by the government toward the declining poverty rates and changes in the quality of life of poor people. Research was conducted in the dwelling area at the bank of the railway at Pasar Senen, Jakarta. Result of the analysis reveals and conclude that: 1) Based on educational level of the people being studied, the poor living along the railway mostly have low educational level and low skill that make them only be able to engage in the informal sector works. 2) The poor in this region are not to live in healthy housing condition since between the dwelling house and the railway is not saperated by permanent wall. 3) Based on the analysis of the policy addressing poverty reduction and the result of identifying the suitability of the poverty reduction policy, research result shows that some formulated policies are not able to be implemented. This due to the some of formulated policy are not fit to the characteristics of the poor. 4) In implementing the program there is communication problem between government officials with the public beneficiaries.

Key words: poverty, poverty reduction policies, declining poverty rates.

Pendahuluan

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar Negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara

berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Booth dan Sundrum, 1987:6).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang.

Jakarta sebagai contoh kota besar memiliki segudang daya tarik yang menggiurkan bagi individu sebagai tempat hidup dan mencari nafkah. Setiap tahunnya, puluhan ribu orang berpindah ke ibukota Negara Indonesia ini untuk mencari peluang yang lebih baik. Perkembangan dan pembangunan yang tidak merata di Indonesia memicu terjadinya migrasi penduduk ke kota-kota besar. Kehidupan di kota kecil dan pedesaan tidak dapat menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi penduduknya.

Masalah mendasar yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Berbagai program pembangunan ditujukan untuk menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta. Salah satu program yang digulirkan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). PPMK merupakan dana bergulir tanpa bunga yang dipinjam oleh masyarakat di Kelurahan yang dapat dimanfaatkan anggota masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. PPMK didesain untuk mengantisipasi kemiskinan dengan memberikan pinjaman kecil kepada warga yang ingin berusaha.

PPMK juga untuk mengajarkan warga miskin mengenai manajemen ekonomi dan keuangan. Program ini telah membantu warga untuk belajar menyusun rencana keuangan jangka panjang. Secara perlahan namun pasti, warga miskin mengambil kendali dalam kehidupan ekonomi mereka, untuk tahun 2010, Pemprov DKI telah mendistribusikan Rp. 83 miliar untuk koperasi jasa keuangan di 16 Kelurahan.

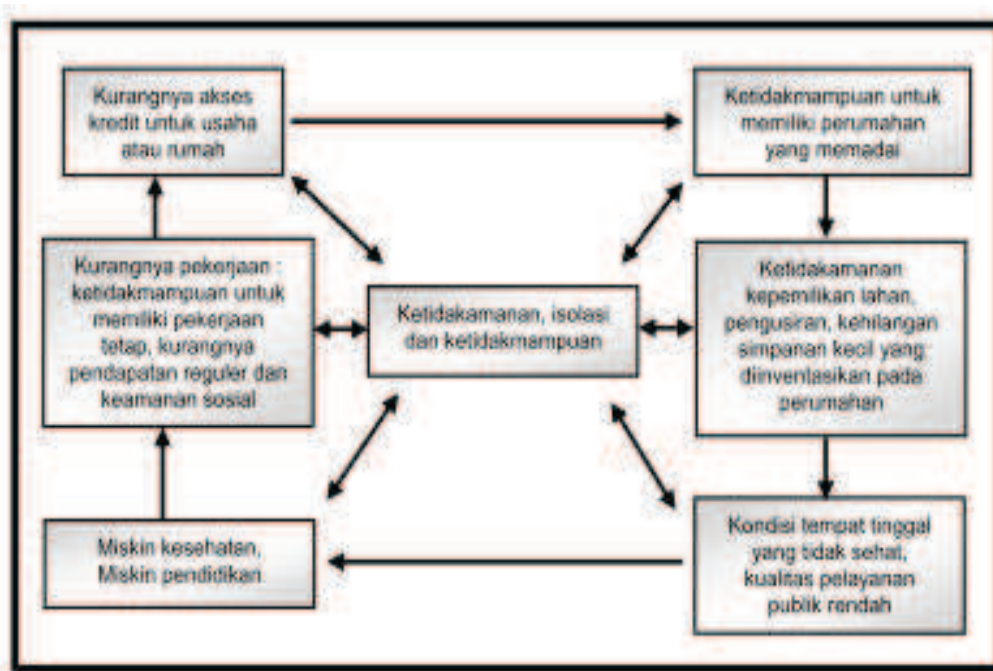
Berbagai upaya Pemprov DKI untuk menurunkan kemiskinan telah membuahkan hasil positif. Angka rata-rata kemiskinan Provinsi DKI Jakarta merupakan terendah di Indonesia.

Kendati demikian, Pemprov DKI telah menurunkan angka kemiskinan di Jakarta mencapai 4,5 % menurun di tahun 2009 menjadi 3,6%. (BPS, 2011:7)

Maka pertanyaan penelitian ini adalah "Apa dampak kebijakan pemerintah daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam penanggulangan kemiskinan penduduk miskin di Bantaran Rek Kereta Api Senen Jakarta ?"

Pembahasan

Dimensi kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan yang biasanya dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk. Satu dimensi kemiskinan sering menyebabkan atau berkontribusi pada dimensi lain (Baharoglu dan Kessides, 2001). Hal ini menunjukkan adanya dampak kumulatif dari kemiskinan perkotaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : diadopsi dari Baharoglu dan Kessides, 2001

Gambar 2.1
Dampak Kumulatif Kemiskinan Perkotaan

Berdasarkan penyebab **kemiskinan** yang diungkapkan oleh Bappenas (2004), Bank Dunia (2003) dan Baharoglu dan Kessides (2001) dapat dijabarkan dimensi kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengetahui karakteristik kemiskinan perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan

Dimensi pendapatan ini berkaitan dengan pekerjaan penduduk miskin. Penduduk miskin perkotaan memiliki karakteristik keterampilan dan kemampuan yang kurang sehingga mereka cenderung tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan tetap. Sektor formal yang berkembang tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan rendah sehingga masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan atas pekerjaan yang layak dan peluang yang terbatas untuk mengembangkan usaha mereka (Baharoglu dan Kessides, 2001:45). Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang seimbang dan kurang kepastian akan keberlanjutannya.

b. Kesehatan

Dimensi kesehatan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan permukiman penduduk miskin yang tidak sehat yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi kualitas kesehatan mereka. Mereka cenderung tinggal pada lingkungan padat dan pada lahan-lahan marginal yang sering kali membahayakan mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permukiman kumuh yang terletak di bantaran sungai. Sebagian besar penduduk yang tinggal di permukiman kumuh merupakan pekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah sehingga mereka memiliki kontribusi yang rendah dalam menjaga kelestarian tempat tinggal mereka yang pada akhirnya mengarah pada degradasi lingkungan. Masalah yang dihadapi penduduk miskin berkaitan dengan layanan perumahan adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan atas pemilikan perumahan (BAPPENAS, 2004:127).

c. Pendidikan

Penduduk miskin perkotaan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung (Bappenas, 2004:125).

d. Keamanan

Dimensi keamanan yang dimaksud di sini berkaitan dengan ketidakamanan kepemilikan lahan. Penduduk miskin perkotaan menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan (Bappenas,

2004:127). Mereka yang berasal dari desa cenderung tinggal pada tanah-tanah kosong pemerintah. Penduduk miskin kota cenderung tinggal pada permukiman kumuh dengan segala keterbatasan pelayanan seperti sanitasi dan air bersih serta lemahnya perlindungan dan *security* atas tanah dan bangunan yang mereka tinggali. Kota yang dianggap menjanjikan oleh masyarakat desa untuk mencari kesejahteraan hidup yang lebih baik memaksa mereka mencari ruang atau lahan kosong sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka. Ruang Terbuka Hijau seperti bantaran sungai dan bantaran jalur rel kereta api menjadi tempat favorit bagi mereka untuk mendirikan bangunan non-permanen untuk tempat tinggal mereka.

e. Kemampuan

Penduduk miskin memiliki kemampuan yang lemah karena mereka tidak diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena mereka dianggap kaum yang lemah dengan tidak adanya perlindungan penuh. Kurangnya informasi kepada penduduk miskin perkotaan menyebabkan mereka tidak memiliki akses dalam mendapatkan pekerjaan yang baik dan layanan hukum karena mereka dianggap sebagai konsumen pasif. (Baharoglu dan Kessides, 2001:135). Lebih lanjut Bank Dunia menjelaskan bahwa lemahnya partisipasi penduduk miskin disebabkan oleh adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung serta tata pemerintahan yang kurang melibatkan penduduk miskin yang tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan.

Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981:69). Menurut Anderson (1984:89), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Menurut sebagian pakar Dye (1981) Anderson (1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

- 1) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya masyarakat miskin (berdasarkan kriteria tertentu), efek yang ditunjukkan oleh kebijakan juga harus ditentukan

2) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau *spillover*, karena jumlah sejumlah *outcome* kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.

3) Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang. Dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan beberapa program seperti diatas, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4) Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program. Hal ini logis dan sejalan dengan beberapa kesepakatan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dibiayai berbagai pihak seperti World Bank, UNDP, Pemerintah Pusat, maupun Daerah.

5) Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi

Sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas. Hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mendasar, pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (Sutyastie dan Prijono 2002:200).

Kemiskinan ini dirasakan lebih berat dan lebih menyulitkan bagi warga yang memang mengalaminya. Dampak dari kemiskinan sendiri begitu mengkhawatirkan, baik bagi individu, masyarakat serta negara.

1) Dampak yang pertama adalah dampak masalah kependudukan, yaitu tidak meratanya kesejahteraan di suatu wilayah yang akhirnya akan menghambat proses pemenuhan sarana dan

prasarana pemenuh kebutuhan. Terbatasnya lapangan pekerjaan pun ternyata bukan hanya penyebab dari kemiskinan, tapi juga dampak dari adanya kemiskinan.

2) Dampak yang kedua adalah dalam hal masalah ekonomi. Jika masyarakat di suatu wilayah termasuk ke dalam kategori miskin, maka mereka akan sibuk mencari atau berupaya untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Mereka tidak bisa secara optimal ikut dalam pembangunan daerah. Kebutuhan sehari-harinya saja tidak dapat dipenuhi secara optimal, bahkan terkadang dibawah standar kelayakan, misalnya akses kesehatan dan pendidikan serta asupan gizi harian. Rendahnya tingkat konsumsi merupakan salah satu indikatornya.

3) Dampak ketiga dari kemiskinan adalah dampak masalah pendidikan. Kemiskinan dekat dengan kebodohan dan keterbelakangan pengetahuan. *Statement* itu sudah sangat sering diucapkan oleh banyak orang. Sebenarnya ini sebuah generalisasi dari keadaan. Warga miskin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas baik. Hal ini karena di negara kita, pendidikan masih menjadi barang mahal yang harus dibeli dengan uang. Padahal, untuk membeli makan dan kebutuhan harian pun sangat sulit bagi mereka. Hal ini akhirnya membuat mereka memilih untuk menerapkan prinsip ‘asal bisa baca’, atau bahkan ‘asal bisa makan ngga perlu pinter’.

4) Dampak lainnya dari kemiskinan adalah rendahnya percaya diri. Kemiskinan biasanya menjadi warisan dari orang tua ke anaknya, terus begitu. Hal ini terjadi karena mental *nrimo* dan pasrah yang diyakini akan membuat hidup mereka tanpa masalah. Mereka enggan melangkahkan kakinya lebih lebar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini.

5) Program Kemiskinan Yang dilakukan di Kelurahan Senen

Adapun program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Senen baik yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, adalah sebagai berikut (Bappeda Jakarta Utara, 2010) :

1. Program PKPS BBM

Kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM adalah dengan mengalihkan subsidi BBM untuk golongan masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, Pembebasan Biaya Pendidikan pada tingkat tertentu, pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi minyak goreng, subsidi gula, dan pembangunan prasarana perdesaan. Kebijakan ini disinergikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

a. BLT kepada Rumah Tangga Miskin

Program BLT merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada penduduk miskin di Kota Jakarta Pusat.

- b. Bantuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM)

Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar memperoleh pendidikan dasar yang lebih baik. Sedangkan untuk BKM ditujukan untuk siswa SMA dan SMK yang tidak mampu. Secara teknis kedua program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat.

- c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Program ini merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu diselenggarakan secara nasional. Pendanaan program ini berasal dari dana APBN melalui Departemen Sosial.

- d. Beras Miskin

Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat dengan membeli Beras di bawah harga pasar.

2. Program P2KP PNPM

Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal yang terwujud dari program ini adalah terbentuknya kelembagaan masyarakat lokal yang mandiri, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga yang peduli terhadap kemiskinan di komunitasnya.

Indikator Kemiskinan di Bantaran Rel Kereta Api Kelurahan Senen Jakarta Pusat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan yang ada di Bantaran Rel Kereta Api Kelurahan Senen Jakarta Pusat yaitu dengan melihat indikator kemiskinan secara umum diantaranya

1. Sanitasi

Pengertian merupakan upaya untuk mencegah penyakit dengan cara menyempatkan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit. Pengertian lain menyebutkan sanitasi merupakan praktek

kebersihan untuk menciptakan perbaikan kualitas esetis dari rumah, fasilitas komersial dan fasilitas umum atau merupakan tindakan untuk menciptakan dan menjaga kondisi yang sehat dan higienis.

Kondisi ekstrem yang terjadi terjadi di kawasan Bantaran Rel Kereta Api Kelurahan Senen, kawasan yang paling parah yang menjadi penyokong kemiskinan terbesar adalah di kawasan luar tembok pembatas milik PJKA. Jika dilihat dari sanitasi lingkungannya jelas tidak memenuhi syarat kesehatan, lingkungan tidak bersih, kesan kumuh diperlihatkan, lantai tanah atau semi permanen, sehingga dengan kondisi ini maka warga rentan dengan penyakit terutama diare, sakit perut, kolera, disentri dan lain-lain.

2. Air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan premer warga yang harus dicukupi setiap hari, sehingga perlu penyediaan air bersih yang cukup. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga di Bantaran Rel Kereta Api Senen lebih banyak menggunakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah baik Desa atau Pemerintah Pusat, adapun fasilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan air pompa yang mengambil dari air tanah, sedangkan sebagian kecil warga dengan memanfaatkan fasilitas dari Stasiun Pasar Senen untuk kebutuhan air bersihnya.

3. Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

Kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) merupakan kebutuhan yang penting sehingga akan sangat menentukan kualitas kesehatan dari warga masyarakat, untuk warga Bantaran Rel Kereta Api Senen lebih banyak menggunakan fasilitas MCK yang dibangun oleh pemerintah hanya sebagian kecil warga menggunakan fasilitas pribadi.

4. Imunisasi

Imunisasi merupakan kebutuhan yang penting bagi bayi untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya, di kalurahan Senen sudah ada Posyandu yang tersebar di RT/RW di seluruh wilayahnya, sehingga dengan keberadaan posyandu ini warga terbantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama untuk bayi mendapatkan imunisasi dan vitamin A bagi bayi di setiap bulan Februari.

5. Perumahan

Rumah sehat secara sederhana yaitu bangunan rumah harus cukup kuat, lantainya mudah dibersihkan. Lantai rumah dapat terbuat dari : Ubin, plesteran, dan tanah yang dipadatkan. Sedangkan syarat-syarat rumah yang sehat jenis lantai yang

tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim penghujan. Lantai rumah dapat terbuat dari: ubin atau semen, kayu, dan tanah yang disiram kemudian dipadatkan.

Dari kriteria diatas untuk perumahan penduduk yang ada di Bantaran Rel belum memenuhi kriteria rumah sehat, karena banyak rumah dalam kondisi yang kumuh, belum berlantai permanen, masih bocor, tembok dari tripek dan lain-lain.

6. Pendapatan

Pendapatan merupakan hal yang penting sebagai ukuran kemiskinan, dari hasil observasi dilapangan telah dapat dilihat bahwa warga yang miskin masuk ke dalam kategori pra sejahtera, dengan didominasi dengan pekerjaan sebagai buruh.

7. Gizi

Gizi keluarga sangat berhubunga kebutuhan makan tiap hari dari warga masyarakat, pola makan 3 x sehari dengan menu yang memenuhi gizi masyarakat. Pada penelitian ini makan dengan pola gizi yang baik harus memenuhi jumlah (3 x sehari), sayur, lauk, dan buah.

8. Alat Transportasi

Transportasi merupakan bagian yang penting untuk mobilitas dan transportasi agar lebih cepat, mudah dan efisien.

Untuk memberikan kejelasan tentang dampak dari kemiskinan dapat dirangkum ke dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel IV. 19

Indikator Kemiskinan di Bantaran Rel Kereta Api Kalurahan Senen

| No | Sub Indikator | Kondisi Nyata | Keterangan |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Sanitasi | sanitasi lingkungannya tidak memenuhi syarat kesehatan, lingkungan tidak bersih, kesan kumuh diperlihatkan, lantai tanah atau semi permanen, sehingga dengan kondisi ini maka warga rentan dengan penyakit terutama diare, sakit perut, kolera, disentri dan lain-lain. | Tidak memenuhi syarat |
| 2. | Air bersih | Diambil dari air tanah dengan menggunakan pompa air manual | Sangat tergantung kondisi air tanah di Jakarta secara umum |
| 3. | Mandi, Cuci | Lebih banyak warga menggunakan | Tidak memenuhi |

| | | | |
|----|-------------------|--|--|
| | dan Kakus | fasilitas umum bahkan di lakukan di sungai | syarat |
| 4. | Immunisasi | Pemerintah desa sudah menyediakan posyandu ditingkat RW/RT, banyak yang tidak bias dapat dengan alasan pekerjaan | Fasilitas ada, tetapi perilaku warga tidak mendukung |
| 5. | Perumahan | Sebagian besar lantai tanah/semi permanent, tembok dari kayu/tripek, ditutup dengan terpal sebagai pelindung bocor atau panas. | Tidak memenuhi syarat |
| 6. | Pendapatan | Sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh, pedagang asongan, pemulung, dan lain-lain pendapatan dibawa Rp. 300 ribu/bulan. | Dibawah UMR Provinsi Jakarta. |
| 7. | Gizi | Memenuhi syarat minimal makan 3 x sehari, dengan nasi, lauk, dan sayur. | Terpenuhi minimal. |
| 8. | Alat Transportasi | terbanyak menggunakan angkutan kota. | Terpenuhi |

Sumber : data primer diolah, 2012.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Bantaran Rel Kelurahan Senen Jakarta Pusat dapat berdampak pada kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan yang tercermin dari karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin dengan melihat indicator kemiskinan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini maka disampaikan saran sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan sebaiknya diimplementasikan dengan lebih terarah pada sasaran rumah tangga miskin dengan memperhatikan karakteristik dari rumah tangga miskin tersebut .
2. Untuk dapat meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin perlu adanya upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka perlu adanya peningkatan program wajib belajar pendidikan 9 tahun, dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat miskin
4. Masih rendahnya masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber dana, maka berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif atau bantuan kredit usaha rakyat harus diprioritaskan.

5. Pemerintah segera membuat kebijakan khususnya bagi warga miskin yaitu program bebas biaya belajar, program bebas biaya berobat, serta program memberi rumah sederhana dengan biaya murah.

Daftar Pustaka

- Awan Setya, 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Penduduk Miskin (Poor Population)*. Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin No.04/Th.II/July, Jakarta: CBS.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah*. Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, 2002. *Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan*, Jakarta, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM
- Jones, C.O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, Grafindo Persada.
- Maskun, Sumitro, 1997 *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen*, Media Widya Mandala, Yogyakarta,
- Nasikun, 1995, *Kemiskinan di Indonesia Memurun*, dalam *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga University Press
- Pasandaran, E. 1994. Hasil Penelitian upaya penanggulangan kemiskinan. Jakarta, Puslitbangnak.
- .Suharto, Edi dkk. 2002, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sumodiningrat, Gunawan 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan*
- Susetiawan, 2002. *Pengembangan Lokalitas Dalam perspektif Sosial Budaya*, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Yogyakarta : UGM.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- TKPK. 2007. *Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahab, S.A. 2004. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta, Bumi Aksara.